



1. Menjelaskankonsep akuntabilitas 2. Menjelaskan mekanisme akuntabilitas 3. Menjelaskan akuntabilitas dalam konteks 4. Mengaktualisasikan nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas







Accountability is the duty to govern or manage. Responsibility is the duty to complete work.

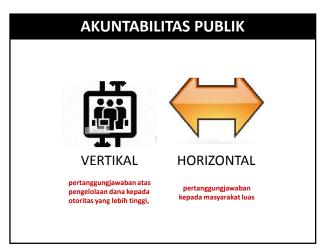
The main difference between **responsibility** and **accountability** is that responsibility can be shared while accountability cannot. Being accountable not only means being responsible for something but also ultimately being answerable for your actions. Also, accountability is something you hold a person to only **after** a task is done or not done. Responsibility can be before and/or after a task.

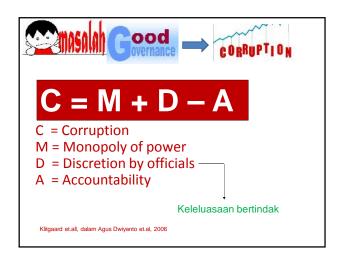


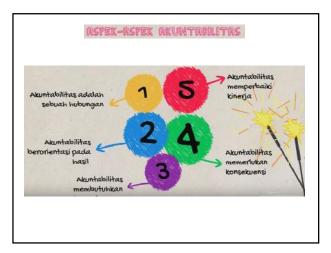
Accept responsibility
for your actions.
Be accountable for
your results.
Take ownership of
your mistakes.

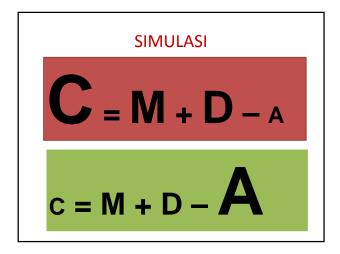






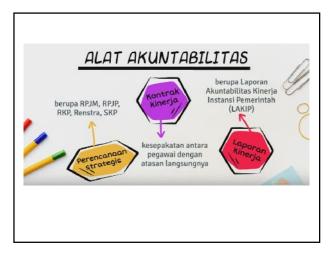




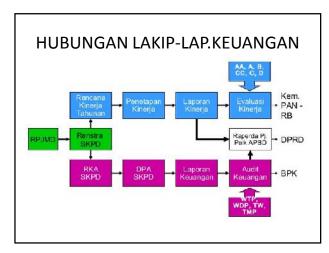




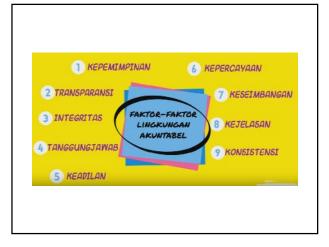


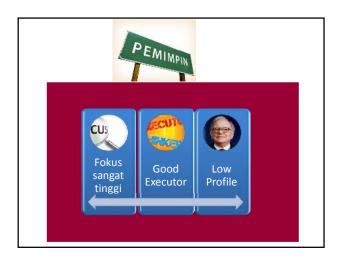












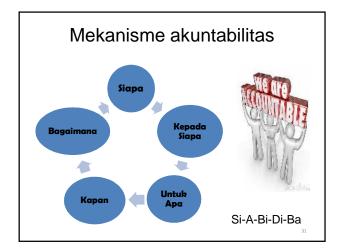














Inpres Nomor 7 Tahun 1999

- Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia.
- Inpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban <u>keberhasilan</u> <u>atau kegagalan</u> misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja
- Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran



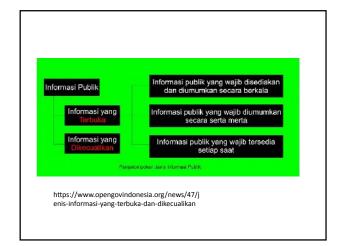
Output akuntabilitas

- Output dari akuntabilitas publik adalah pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.
- Pelayanan publik yang berkualitas
- Publik sudah membayar pajak kepada pemerintah, akuntabalitasnya dilaporkan melalui pemberian layanan publik yang berkualitas















Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Praktek Kecurangan

- 1)Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi;
- 2) Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif;
- 3) Perekrutan dan Promosi Pegawai;
- 4)Pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan;
- 5) Menciptakan Saluran Komunikasi yang Efektif;
- 6) Penegakan Kedisiplinan;
- 7) Menciptakan Kerjasama Pengawasan

4.5

Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah

organisasi akuntabel adanya proses kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya.

Informasi dapat berupa data maupun penyampaian/penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan.

Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus *relevant* (relevan), *reliable* (dapat dipercaya), *understandable* (dapat dimengerti) serta comparable (dapat diperbandingkan)



46

Transparansi dan akses informas



Kategori Informasi Publik

- Yang wajib disediakan dan diumumkan
- Yang dikecualikan/Bersifat Rahasia

Prinsip-prinsip keterbukaan informasi:

- Maximum Access Limited Exemption (MALE)
- •Permintaan tanpa disertai alasan
- •Mekanisme sederhana, murah, cepat
- •Informasi harus utuh dan benar
- •Informasi proaktif
- Perlindungan pejabat yang beritikad baik

44





- ► Semua penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku
- ► Menggunakannya secara bertanggung-jawab, efektif dan efisien
- ► Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab.





Bagaimana cara mengidentifikasi konflik kepentingan:

Tugas publik dengan kepentingan pribadi

Apakah saya memiliki kepentingan pribadi atau swasta yang mungkin bertentangan, atau dianggap bertentangan dengan kewajiban publik?

Potensialitas

- Mungkinkah ada manfaat bagi saya sekarang, atau di masa depan, yang bisa meragukan objektivitas saya?
- Bagaimana keterlibatan saya dalam mengambil keputusan / tindakan dilihat oleh orang lain?

Proporsionalitas

Apakah keterlibatan saya dalam keputusan tampak adil dan wajar dalam semua keadaan?

Presence of Mind

- Apa konsekuensi jika saya mengabaikan konflik kepentingan?
- Bagaimana jika keterlibatan saya dipertanyakan publik?

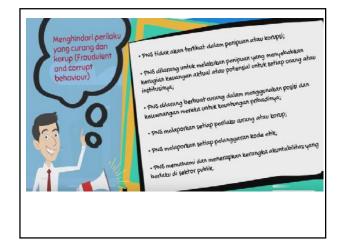
Janji

- Apakah saya membuat suatu janji atau komitmen dalam kaitannya dengan permasalahan?
- Apakah saya berdiri untuk menang atau kalah dari tindakan / keputusan yang diusulkan?



PNS AKUNTABEL

- Perilaku individu PNS yang baik
- Perilaku Berkaitan dgn Transparansi dan Akses Informasi
- Menghindari Perilaku Curang dan Koruptif
- Perilaku thd Penggunaan Barang Negara
- Perilaku Berkaitan dgn Data dan informasi pemerintah
- Perilaku Berkaitan dengan Konflik kepentingan



PNS DIHARAPKAN AKUNTABEL (Personal Behavior)

- 🖰 Bertindak sesuai aturan, kebijakan, dan kode etik
- Tidak mengganggu, menindas, melakukan kekerasan dan diskriminatif thd rekan atau anggota masyarakat
- Bekerja secara profesional, menciptakan hubungan harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif
- Memperlakukan stakeholder dgn hormat, sopan santun, jujur, adil memperhatikan kepentingan mereka hak kesamaan dan kesejahteraan
- Membuat keputusan adil tidak memihak sesuai peraturan, kebijakan dan prosedur institusi
- Melayani stakeholder setiap saat dan selalu memberi masukkan informasi dan kebijakan

PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan elisien. Hal ini termasuk frailitas kantardan peralatan, kendaraan, voucher biaya taksi, kredit korporasi kartu dan pembelian baragi didanai publik satutu dan pembelian baragi dan jasa.

PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan.

PNS tidak menggunakan waktu kantar atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keunagan

PNS menggunakan sembat secara teliti dan elisien.

PNS menggunakan sembat daya tersebut secara bertanggung jawab.

PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa sehap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan.

PNS menggunakan sehap instansi daya tersebut secara bertanggung jawab.

PNS menggunakan sehap instansi daya tersebut secara bertanggung jawab.

PNS menggunakan sehap instansi daya tersebut secara bertanggung jawab.

PNS menggunakan sehap instansi daya tersebut secara bertanggung jawab.

PNS menggunakan sehap instansi daya tersebut secara bertanggung jawab.

PNS menggunakan sehap instansi daya tersebut secara bertanggung jawab.

PNS menggunakan sehap penggunakan sebap perjalanan dana pengeluaran pang milik negara secara bertanggung jawab.

PNS menggunakan sehap penggunakan sehap penggunakan sebap p





KEPUTUSAN YANG AKUNTABEL

- ✓ Tindakan/keputusan berimbang/tidak bias
- ✓ Bertindak adil;
- ✓ Akuntabel dan transparan;
- ✓ Bekerja secara penuh, efektif dan efisien;
- ✓ Berperilaku sesuai dengan standar, kode dan etika;
- Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi konflik kepentingan

56

Indikator Akuntabilitas

- 1. Kepemimipinan
- 2. Transparansi
- 3. Integritas
- 4. Tanggung jawab
- 5. Keadilan
- 6. Kepercayaan
- 7. Kejelasan
- 8. Konsistensi
- 9. Menghindari Fraud dan Korupsi
- 10. Penggunaan SDMN
- 11. PPDIP
- 12. Menghindari Konflik Kepentingan
- 13. Laporan